



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

**Judul** : DPR RI  
**Tanggal** : Rabu, 24 Agustus 2016  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : -

DPR RI Pemerintah harus bisa mencerminkan asumsi ekonomi makro ke hal-hal riil di masyarakat. Semua fraksi di DPR RI menyatakan setuju agar rancangan undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2017 (RAPBN 2017) beserta Nota Keuangan yang diusulkan pemerintah dibahas ke tahap lebih lanjut. Namun, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini, masing-masing fraksi memberikan catatan khusus kepada pemerintah untuk dicermati. Taufik mengatakan secara umum semua fraksi di DPR mengapresiasi pemerintah dalam menyusun RAPBN 2017. Namun, ia berharap, pemerintah nantinya tidak hanya berkutat pada asumsi makro saja, tapi juga harus bisa mencerminkan bagaimana hal-hal riil di masyarakat terbawa dalam satu tarikan napas. Misalnya masalah Koefisien Gini, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. "Jadi pemerintah tidak hanya berkutat pada angka-angka saja. Tapi harus yang riil di masyarakat kita," ujar Taufik usai memimpin Rapat Paripurna Pemandangan Umum atas RAPBN 2017 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR, Selasa, 23 Agustus 2016. Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya Eka Sastra, menyampaikan, RAPBN 2017 yang diusulkan pemerintah telah memenuhi aspek kredibilitas. Selain itu, lebih realistis dalam memproyeksikan perkembangan ekonomi yang masih diwarnai ketidakpastian. "Tapi kami berharap itu tidak menghilangkan fungsi APBN sebagai pemulih perekonomian domestik. Apalagi di tengah pelambatan ekonomi global yang masih menghantui, serta masih terbatasnya ruang gerak investasi swasta dan konsumsi masyarakat saat ini," ucapnya. Eka mengatakan, di tengah tekanan seperti ini, APBN harus muncul sebagai frame mover perekonomian domestik, serta dengan asumsi dan postur yang lebih kredibel dan lebih ekspansif. Target penerimaan juga tidak boleh menyebabkan disefisiensi bagi iklim usaha. "Belanja negara harus lebih terarah pada sektor yang lebih memiliki multiplier effect yang besar," tuturnya. Sementara itu, Fraksi PAN meminta pemerintah mengoreksi defisit RAPBN 2017 yang ditetapkan sebesar 2,14 persen. Menurut juru bicara F-PAN Sukiman, hal ini bisa membahayakan keuangan negara. "Kami juga menolak penambahan utang pemerintah sebesar Rp 389 triliun pada 2017. Hal ini mengkhawatirkan, karena penambahan utang negara dalam dua tahun terakhir jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya," katanya. F-PAN juga mendorong pemerintah agar dana transfer daerah digunakan untuk memperkecil kesenjangan antar-wilayah. "Karena itu, kami mendukung pemerintah yang menetapkan dana transfer daerah lebih besar daripada anggaran kementerian/lembaga," ujarnya. Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangannya, yang dibacakan juru bicara Sirmadji, menyampaikan agar pertumbuhan ekonomi hendaknya membawa dampak untuk menggerakkan sektor-sektor perekonomian rakyat, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, dan industri pengolahan dasar. Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada industri nasional dan UMKM agar bisa bersaing di kancah internasional. "Pertumbuhan ekonomi juga harus dipastikan untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, iklim investasi, dan daya beli masyarakat," katanya. Adapun Fraksi Gerindra menyampaikan, pertumbuhan ekonomi yang disebutkan pemerintah dalam RAPBN 2017 cenderung bersifat moderat. "Seharusnya pemerintah harus lebih optimistis karena sudah ada sentimen positif seperti kebijakan tax amnesty, yang seharusnya memberikan stimulus terhadap perekonomian nasional," ujar juru bicara Mohammad Nizar Zahro...